



# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

**Pasal 2**

Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

**Pasal 3**

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

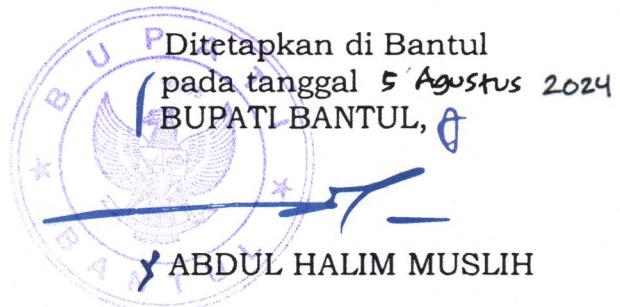
BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

**KAPANEWON PLERET**

KABUPATEN BANTUL

---

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

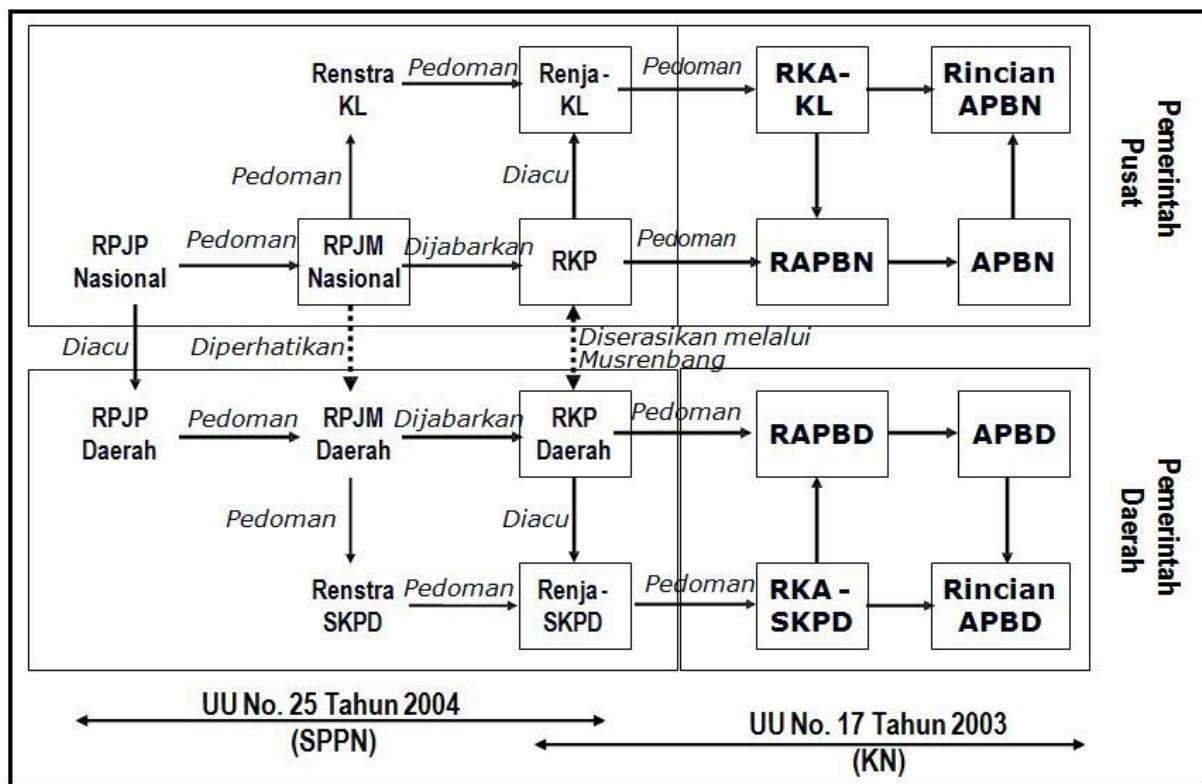
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Pleret. Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## **BAB II.**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

#### **2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023,
2. Evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan  
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

## Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
4.01.0 4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4.01.0 4.5.06. 0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan keistimewaan yang disusun	8 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	62,5
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	80 Angka	80 Angka	80 Angka	100	81 Angka	81 Angka	81 Angka
7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	14 Dokumen	50
7.01.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	10 Laporan	50
7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	26 Orang/bulan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	100	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	86

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026</b>	<b>Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>			<b>Target Kinerja Tahun 2024</b>	<b>Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024</b>	
					<b>Target Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)</b>		<b>Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024</b>	<b>Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024(%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8) = (7/6)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10) = (5+7+9)</b>	<b>(11) = (10/4)</b>
7.01.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	6 Dokumen	50
7.01.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	88 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	100	22 Laporan	44 Laporan	50
7.01.0 1.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.0 1.2.05. 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	50
7.01.0 1.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum</b>	100	90	100	100	100	100	100	100
7.01.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	10 jenis	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	8 Paket	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
7.01.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	36 Jenis	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	8 Paket	50
7.01.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	22 jenis	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	8 Paket	50
7.01.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	8 Paket	50
7.01.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	50
7.01.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980 Laporan	240 Laporan	218 Laporan	218 Laporan	100	240 Laporan	698 Laporan	71,22
7.01.0 1.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	25
7.01.0 1.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	25



<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026</b>	<b>Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>			<b>Target Kinerja Tahun 2024</b>	<b>Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024</b>	
					<b>Target Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)</b>		<b>Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024</b>	<b>Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024(%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8) = (7/6)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10) = (5+7+9)</b>	<b>(11) = (10/4)</b>
7.01.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		7 Unit	7 Unit	100	9 Unit	9 Unit	100
7.01.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100
7.01.0 2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik</b>	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen	95 Persen	95 Persen	95
7.01.0 2.02.0 1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon</b>	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100
7.01.0 2.02.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	8 Laporan	50
7.01.0 2.02.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	5 Laporan	9 Laporan	56,25

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026</b>	<b>Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>			<b>Target Kinerja Tahun 2024</b>	<b>Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024</b>	
					<b>Target Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)</b>		<b>Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024</b>	<b>Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024(%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8) = (7/6)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10) = (5+7+9)</b>	<b>(11) = (10/4)</b>
7.01.0 2.02.0 4	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Capaian kinerja pelayanan kapanewon</b>	100 Persen	100 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100
7.01.0 2.02.0 4.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	4 Laporan	50
7.01.0 3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat</b>	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100	90	95	95
7.01.0 3.02.0 1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan</b>	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100	90	90	90
7.01.0 3.02.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musya-warah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	100	10 Lembaga	10 Lembaga	100
7.01.0 3.02.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56 laporan		14 Laporan	14 Laporan	100	10 Lembaga	24 Laporan	25

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026</b>	<b>Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>			<b>Target Kinerja Tahun 2024</b>	<b>Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024</b>	
					<b>Target Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)</b>		<b>Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024</b>	<b>Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024(%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8) = (7/6)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10) = (5+7+9)</b>	<b>(11) = (10/4)</b>
7.01.0 3.02.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90
7.01.0 3.02.0 3.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	8 Laporan	50
7.01.0 4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon</b>	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen		95 Persen	95
7.01.0 4.02.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100 Persen		90 Persen	90
7.1.4.2 .01.01. 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	10 Laporan	50
7.01.0 5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100
7.01.0 5.02.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026</b>	<b>Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022</b>	<b>Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>			<b>Target Kinerja Tahun 2024</b>	<b>Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024</b>	
					<b>Target Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)</b>		<b>Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024</b>	<b>Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024(%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8) = (7/6)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10) = (5+7+9)</b>	<b>(11) = (10/4)</b>
	<b>sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>pemerintahan umum</b>								
7.01.0 5.02.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang		40 Orang	40 Orang	100	50 Orang	90 orang	45

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target  
Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	NIHIL	NIHIL

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	<b>ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	
	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	
	Gelar Budaya Jogja	Koordinasi dan kerjasama yang baik dari internal Pemerintah Kapanewon dan Kalurahan se-Kapanewon Pleret
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	
	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Koordinasi dan kerjasama yang baik dari internal Pemerintah Kapanewon dan Kalurahan se-Kapanewon Pleret
3.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
3.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan perencanaan tepat waktu
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaporan tepat waktu
3.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
C	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lokasi penyedia yang dekat/terjangkau
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Barang yang dibutuhkan mudah diperoleh

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya dukungan dan kerja sama dengan instansi terkait
h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Adanya dukungan dan kerja sama dengan instansi terkait
3.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
a	Pengadaan Mebel	Tersedianya rekanan yang memenuhi kualifikasi
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya rekanan yang memenuhi kualifikasi
3.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	
a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat
4.2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
5.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
5.2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat
6	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
6.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
7	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
7.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan;
2. Peningkatan sinergitas dengan Pemerintah Kalurahan;
3. Pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok (KWT, Bumkal, dll)

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Pleret berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis

kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pleret  
Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	93,35	91	93,37	92	93	94	Nilai IKM diukur dari Skoring terhadap 9 punsur kepuasan pelanggan

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pleret Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon dapat memenuhi target. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan dan semua karyawan/karyawati Kapanewon Pleret terhadap pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan;
- Kompetensi petugas di unit pelayanan cukup memadai.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Pleret Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas bagi petugas pelayanan;
- Penataan ulang Ruang Pelayanan;
- Melaksanakan Survei Harian terhadap kepuasan pelanggan.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kapanewon Pleret merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
Kompetensi pegawai yang cukup memadai	Etos kerja pegawai belum optimal
Kerjasama yang baik dengan lintas sektor	Sistem kerja masih parsial
Potensi wisata yang prospekstif, Seperti: 1) Kalurahan Pleret a. Situs-situs Peninggalan Mataram Islam (Situs Kedaton, Makam Ratu Labuan, Sumur Gumuling, Masjid Taqorrub Kanggotan, Situs Kedaton 2). b. Museum Purbakala  2) Kalurahan wonolelo a. Air Terjun Pogog  3) Kalurahan Bawuran a. Puncak Sosok  4) Kalurahan Segoroyoso a. Bukit Ngleseh  5) Kalurahan wonokromo a. Taman Glugud	Fungsi pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran belum terlaksana dengan baik
Potensi Industri Kerajinan dan Pangan Olahan/Kuliner yang berkembang, seperti Peci Rajut buatan, Gujahe Temulawak Asli Kerto Pleret, Kerajinan Accessories Interior, Industri Tahu bu Muryanti, Usaha Kuliner Jaddah Jenang bu Poniyem, Sate Kuda Segoroyoso, Desa Sentra Rambak Kulit.	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang tertarik untuk menekuni industri tersebut.

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

## Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	Adanya potensi bencana alam di wilayah kapanewon (banjir, angin puting beliung, kekeringan, tanah longsor, kebakaran, dll)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Bantul	Tuntutan akan adanya Transparansi/keterbukaan informasi publik dari masyarakat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kinerja pegawai sesuai kompetensinya;
2. Membina hubungan kerjasama lintas sektor dalam melaksanakan fungsi kewilayahan;
3. Optimalisasi pengendalian internal pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
4. Penguatan sarpras teknologi dan informasi ;
5. Mengikutsertakan karyawan kapanewon dalam kegiatan peningkatan kapasitas pegawai yang diselenggarkan BKPSDM Kabupaten Bantul;
6. Menyelenggarakan kegiatan penggalangan komitmen bersama untuk karyawan kapanewon;
7. Penanggulangan dan penanganan bencana alam terpadu bersama masyarakat.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pleret Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	116.040.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	116.040.000	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	66.040.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	66.040.000	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapane won Pleret	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapane won Pleret	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dokumen	66.040.000	
	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>		<b>Capaian Kinerja peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>		<b>Capaian Kinerja peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50.000.000</b>	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen hasil Implementasi Budaya Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen hasil Implementasi Budaya Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	<b>81 Angka</b>	<b>3.409.014.352</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>81 Angka</b>	<b>3.409.014.352</b>	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(AKIP)								
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	8.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	8.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.250.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.250.000	
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasi an keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.617.530.352	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasi an keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.617.530.352	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapane won Pleret	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	2.539.030.352	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapane won Pleret	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	2.539.030.352	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	72.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	72.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	22 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	22 Laporan	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD			
2.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengadministrasi an kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengadministrasi an kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6.000.000</b>	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	6.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	6.000.000	
2.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>242.484.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>242.484.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapane won Pleret	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapane won Pleret	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapane won Pleret	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapane won Pleret	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapane won Pleret	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	17.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapane won Pleret	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	17.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapane won Pleret	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	16.984.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapane won Pleret	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	16.984.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	150.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	7.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	7.500.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.500.000	
2.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>108.600.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>108.500.000</b>	
	Pengadaan Mebel	Kapane won Pleret	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	Pengadaan Mebel	Kapane won Pleret	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapane won Pleret	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	78.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapane won Pleret	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	78.500.000	
2.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>226.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>226.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			<b>Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	17.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	17.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	147.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	147.000.000	
<b>2.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>200.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapane won Pleret	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kapane won Pleret	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	150.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapane won Pleret	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapane won Pleret	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>		<b>Cakupan penyelenggaran</b>	<b>95 Persen</b>	<b>119.500.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>		<b>Cakupan penyelenggaran</b>	<b>95 Persen</b>	<b>119.500.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		pemerintahan dan pelayanan publik			<b>PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		pemerintahan dan pelayanan publik			
3.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 Persen	82.500.000	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 Persen	82.500.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	39.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	39.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	43.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapane won Pleret	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	43.500.000	
3.2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 Persem	37.000.000	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 Persem	37.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	37.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	37.000.000	
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 Persen	232.000.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 Persen	232.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>155.000.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>155.000.000</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapane won Pleret	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapane won Pleret	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	35.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	120.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	120.000.000	
4.2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>77.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		<b>Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>77.000.000</b>	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	77.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	77.000.000	
5	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Cakupan Koordinasi ketentraman dan ketertiban kapaneweon</b>	<b>95 Persen</b>	<b>185.000.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Cakupan Koordinasi ketentraman dan ketertiban kapaneweon</b>	<b>95 Persen</b>	<b>185.000.000</b>	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 Persen	185.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan	90 Persen	185.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								<b>keterlibatan umum</b>			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	185.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapane won Pleret	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	185.000.000	
6	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>55.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>55.000.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>55.000.000</b>	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapane won Pleret	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	55.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapane won Pleret	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	55.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
<b>JUMLAH</b>				<b>4.116.554.352</b>					<b>JUMLAH</b>	<b>4.116.554.352</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Kapanewon Pleret.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku

Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Wonokromo	Terlaksananya Penguatan Tebing Sungai Belik	2 Paket	Kalurahan
		Pleret-Grojogan, Pleret (K 656)	Terlaksananya pembangunan drainase jalan	1 Paket	Kalurahan
		Kauman, Pleret	Terlaksananya Pembangunan Saluran Peresapan Air Hujan (SPAH)	2 Paket	Kalurahan
		Kanggotan, Pleret	Terlaksananya pembangunan cor blok (padat karya)	1 Paket	Kalurahan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Trayeman, Pleret	Terlaksananya pembangunan cor blok (padat karya)	1 Paket	Kalurahan
		Jembangan RT 01 dan RT 02, Segoroyoso	Terlaksananya pembangunan drainase jalan (padat karya)	1 Paket	Kalurahan
		Jembangan RT 01 dan RT 02, Segoroyoso	Terlaksananya pembangunan cor blok (padat karya)	1 Paket	Kalurahan
		Srumbung RT 01 dan RT 02, Segoroyoso	Terlaksananya pembangunan cor blok (padat karya)	1 Paket	Kalurahan
		Tegalrejo RT 4 Bawuran	Terlaksananya pembangunan drainase	1 Paket	Kalurahan
		Purworejo-Ploso, Wonolelo (K 741)	Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten	1 paket	Kalurahan
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kerto, Pleret	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Wifi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	1 paket	Kalurahan
		Pungkuran, Pleret	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Wifi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	1 paket	Kalurahan
		Gerbang Pleret	Pembangunan/rehabilitasi Gazebo	1 paket	Kalurahan

## **BAB III.**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

- PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan.
- PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Pleret Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resikobencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah" dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerataan kualitas infrastruktur.
3. Peningkatan SDM berdaya saing.
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Perkiraan Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Target Tahun 2025</b>
				<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>		
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indikator Kepuasan masyarakat (IKM) Kapanewon	93,35	93,37	92	93

**BAB IV.**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pleret Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Pleret Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Kabupaten Bantul

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Kapanewon Pleret						3.354.957.715,00								4.726.216.352,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						40.000.000,00								40.000.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						40.000.000,00								40.000.000,00			
1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	04	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	-			100 Persen	40.000.000,00						-	40.000.000,00			
	2	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	0501	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi	-			3 Dokumen	40.000.000,00					Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	-	40.000.000,00	
	2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	05007	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	40.000.000,00										
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							100.000.000,00								100.000.000,00		
	4	SEKRETARIAT DAERAH							100.000.000,00									100.000.000,00	
2	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	08	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-			100 Persen	100.000.000,00						-	100.000.000,00			









No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		3.500.000,00	KAPANEWON PLERET	
7 0 1	0 1	0 2	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	96.174.500,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		155.000.000,00	KAPANEWON PLERET	
7 0 1	0 1	0 2	0 0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	4.552.500,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		7.500.000,00	KAPANEWON PLERET	
7 0 1	0 1	0 2	0 0 1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		7.500.000,00	KAPANEWON PLERET	









No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			10 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		38.000.000,00	KAPANEWON PLERET		
7 0 1	0 3	2 0 0 1	0 0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14 Laporan	59.557.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		120.000.000,00	KAPANEWON PLERET		
7 0 1	0 3	2 0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-		100 Persen	45.425.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	-	82.000.000,00		
7 0 1	0 3	2 0 0 4	0 0 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			4 Laporan	45.425.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		82.000.000,00	KAPANEWON PLERET		
6 7 0 1	0 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBATAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	-		95 Persen	130.000.000,00						-	190.000.000,00		

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	7	0	0	4	2	.	0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	-		90 Persen	130.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	-	190.000.000,00		
	7	0	0	4	2	.	0	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
									Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5 Laporan	130.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		190.000.000,00	KAPANEWON PLERET		
7	7	0	0	5					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-		100 Persen	3.400.000,00						-	60.000.000,00		
	7	0	0	5	2	.	0	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Umum	-		100 Persen	3.400.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	-	60.000.000,00		
	7	0	0	5	2	.	0	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
									Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka			50 Orang	3.400.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		60.000.000,00	KAPANEWON PLERET		

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
					J U M L A H	3.354.957.715,00											4.726.216.352,00	

**BAB V.**  
**PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

